



## **Strategi Pembelajaran Potret Pemerataan Pendidikan Kristen Di Desa**

**Stefani Olivia Ndolu** ✉ **Yonatan Alex Arifianto**

Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga

[oliviandolu147@gmail.com](mailto:oliviandolu147@gmail.com) ✉ [arifianto.alex@sttsangkakala.ac.id](mailto:arifianto.alex@sttsangkakala.ac.id)

**Abstract:** *This research is motivated by the portrait of education equity in the village that occurs in Indonesia, especially in the world of education in the village. The method used for research is descriptive qualitative and literature review method from various literature studies from research articles that are relevant to the theme. And in the village how the distribution of education in the village. The results of this study show that 1. Education equity is part of the decentralisation program. Changes that occur in government from centralisation to decentralisation that have been determined by the Central Government by stipulating the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government replacing the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004 which is considered not in accordance with the development of circumstances, state administration and Regional Government Education equity implemented. 2. Education in the city is indeed different from that in the village, one of which is the inability of the village to face the rapid development of the city The cause is the weak education system in the village itself. Often No teaching development is carried out in many village schools We adapt first to the needs of the community.*

**Keywords:** *Learning Strategy Portrait of Education Equity in the Village*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatar belakangkan dengan potret pemerataan pendidikan di desa yang terjadi di Indonesia khususnya di dunia pendidikan di desa tersebut. Metode yang dipakai untuk penelitian adalah deskriptif kualitatif dan metode kajian yang literature dari berbagai kajian pustaka dari artikel hasil penelitian yang relevan dengan tema. Dan di desa bagaimana pemerataan pendidikan di desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan merupakan bagian dari program desentralisasi. Perubahan yang terjadi di pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan Pemerintah Daerah Pemerataan pendidikan yang dilaksanakan. Pendidikan di kota memang berbeda dengan di desa salah satunya adalah ketidakmampuan desa menghadapi pesatnya perkembangan kota Penyebabnya adalah lemahnya sistem pendidikan di desa itu sendiri. Sering Tidak ada pengembangan pengajaran yang dilakukan di banyak sekolah desa Kami beradaptasi terlebih dahulu dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata-kata kunci:** Strategi Pembelajaran Potret Pemerataan Pendidikan di Desa

### **PENDAHULUAN**

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 31 ayat 2 UUD 1945. Namun, kenyataannya, masih banyak kasus kesenjangan pendidikan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Contohnya, setelah kasus jembatan miring di Lebak, Banten, dan di Kabupaten Pesisir Selatan, Padang, ada juga kasus serupa di Desa Kangenan, Pamekasan, Jatim.

Di jembatan ini, warga yang pergi kerja atau sekolah mempertaruhkan nyawa mereka, termasuk para pelajar, karena jembatan tersebut adalah akses terdekat ke tujuan mereka. Melihat masih banyak kesenjangan pendidikan di Indonesia, penting untuk mengambil tindakan upaya untuk mempercepat pemerataan pendidikan khususnya di daerah tersebut untuk mengadakan sebuah pendidikan yang baik dan merata. Pemerintah berupaya menjembatani kesenjangan ini melalui Kementerian Pendidikan. Salah satu upayanya adalah dengan mendirikan program sarjana di Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (SM-3T).

Namun jika tujuan program SM-3T adalah untuk menjadi solusi permasalahan pendidikan di wilayah 3T, maka tujuan tersebut akan sulit tercapai karena kebijakan tersebut tidak rasional dan tidak baik. Meratakan pendidikan keberlanjutan di bidang 3T. Program ini menawarkan solusi terhadap permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Keunggulan dari program ini adalah kurikulum yang disesuaikan dengan potensi daerah 3T, pelatih dibekali dengan keahlian khusus terkait daerah 3T, sistem pelatihan yang memerlukan kreatifitas guru dan masyarakat setempat, kesejahteraan pelatih akan lebih baik. Di kota-kota, serta memastikan infrastruktur yang memadai dan menciptakan suasana kekeluargaan antar pelatih di wilayah 3T.<sup>1</sup> Dengan demikian program SM-3T bertujuan untuk meratakan pemerataan pendidikan di wilayah 3T dengan menyesuaikan kurikulum dengan potensi daerah, melatih guru dengan keahlian khusus, meningkatkan kesejahteraan pelatih, serta memastikan infrastruktur memadai dan terciptanya suasana kekeluargaan di antara pelatih di wilayah 3T.

Menurut Khusnan Iskandar, dengan kondisi pendidikan saat ini, sulit menghadirkan suatu pendidikan yang benar-benar berperan penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang kuat di era globalisasi. Namun, dimana keadaan pendidikan yang demikian telah membuka sebuah peluang bagi mereka lebih optimis untuk menawarkan berbagai program strategis sebagai solusi atas masalah tersebut. Pandangan Natsir menyatakan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk menjadikan anak didik memiliki sifat-sifat kemanusiaan dengan akhlak yang baik dan berkualitas.<sup>2</sup> Indonesia merupakan suatu negara yang besar dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, yang memiliki potensi sangat besar menjadi bangsa yang maju, bermartabat, dan lebih baik. Hal ini bisa terwujud dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, dan memiliki visi yang jelas untuk kemajuan bangsa. Untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan adalah faktor terpenting yang tidak bisa diabaikan. Tujuan dari pendidikan nasional bukan hanya untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, akan tetapi juga untuk membentuk suatu kepribadian yang berkarakter, bermoral, kreatif, memiliki visi dan misi yang baik, bertanggung jawab, dan terampil. Kesuksesan seseorang sangat dipengaruhi oleh potensi yang dimilikinya. Potensi di sini bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga kemampuan untuk menerapkannya demi kebaikan banyak orang, serta kemampuan mengelola diri sendiri dan orang lain. Pekerjaan sosial adalah profesi profesional yang memiliki

---

<sup>1</sup> Primanita Sholihah Rosmana et al., "Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan Di Daerah 3T," *Attadib: Journal of Elementary Education* 6, no. 2 (2023): 405–418.

<sup>2</sup> Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, and Wiryanto, "Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan," *Jurnal Cakrawala Pendas* 8, no. 3 (2022): 932–940.

banyak bidang fokus, salah satunya adalah menangani masalah-masalah di sekolah, yang sering disebut sebagai pekerja sosial sekolah. Sayangnya, masih banyak sekolah yang belum memiliki pekerja sosial. Selain berperan sebagai pekerja sosial sekolah, mereka juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dalam proses belajar mengajar.<sup>3</sup> Dengan demikian pendidikan di Indonesia, meskipun menghadapi tantangan di era globalisasi, harus diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, kreatif, dan memiliki visi yang jelas, dengan dukungan pekerja sosial sekolah yang berperan penting dalam mengatasi masalah pendidikan dan mendukung proses belajar mengajar.

Dalam dunia Pendidikan, konsep menghargai adalah satu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh terlepas dari konteks bangsa Indonesia yang menganut 6 agama yang resmi di akui oleh negara, perlu saling menghormati, menghargai perbedaan kemudian saling menerima keanekaragaman. Sikap tersebut harusnya tertanam dengan adanya rasa penerimaan dari setiap makhluk sosial yang dalam penelitian ini mau membangun pendidikan yang merata.<sup>4</sup> Menurut Kompas.com yang dikutip Ayunda dari penjelasan Iwan bahwa perlu kualitas Pendidikan untuk semua, karena korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berantas pun tuntas. Orang-orang yang duduk di pemerintah tidak semuanya takut akan Tuhan dan mendasarkan kinerja kerja mereka berdasarkan Firman Tuhan. UUD 1945 yang mengatur pendidikan di negara ini, masih saja ada berbagai kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sehingga realisasinya tidak seperti yang tertulis dalam UUD 1945. Jika kita melihat dan mempelajari Alkitab serta teologi Kristen maka sejumlah pemikiran dapat dikemukakan berkaitan dengan pendidikan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan tema artikel ini terkait pentingnya Strategi Pembelajaran Potret Pemerataan Pendidikan di Desa. Pernah diteliti oleh Yosef Patandung, Selvi Panggua dalam penelitian yang berjudul tema Analisis Masalah-Masalah Tantangan Pendidikan yang mana Patandung dkk membahas kurangnya kompetensi para pendidik dalam menggali potensi peserta didik para pendidik kurang memberi perhatian tentang apa yang menjadi kebutuhan utama peserta didik. Adapun penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran di zaman sekarang perlu diperhatikan untuk menjaga timbulnya tantangan atau masalah yang terjadi di dunia pendidikan yang mengakibatkan para peserta didik kesusahan dalam proses belajar mengajar dan itu sangat buruk.<sup>6</sup> Topik yang senada ini juga pernah diteliti oleh Lola Iganti Saragih, Padhilah Dikir, Kuat Sidik Wahyono dan Suparna Wijaya membahas adanya aturan yang jelas ini akan memudahkan pemerintah untuk segera memperoleh jasa pendidikan sebagai kepentingan banyak masyarakat bahkan dapat mengalokasikan penerimaan pendidikan tersebut. Dan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketidakadilan tersebut tidak lagi terjadi, maka dibutuhkan aturan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang mengklasifikasikan tingkat ketidakmerataan di

---

<sup>3</sup> Benediktus Vito and Hetty Krisnani, "Kesenjangan Pendidikan Desa Dan Kota," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2015).

<sup>4</sup> Rusman Hadi, "Respon Lembaga Pendidikan Islam Terhadap Isu Kristenisasi Pasca Gempa Di Dusun Lololan Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara" 7, no. 1 (2022): 256–266.

<sup>5</sup> Asmat Purba, Martin L Manao, and Alon Mandimpu Nainggolan, "Potret Pendidikan Di Indonesia: Pandangan Dan Peran Pendidik Kristen," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 178–189.

<sup>6</sup> Yosef Patandung and Selvi Panggua, "Analisis Masalah-Masalah Pendidikan Dan Tantangan Pendidikan Nasional," *Jurnal Sinestesia* 12, no. 2 (2022): 794–805.

dunia pendidikan.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang permasalahan, dan fenomena yang terjadi serta penelitian terdahulu masih ada celah yang belum di narasikan dalam kajian pembahasan yaitu tentang Strategi Pembelajaran Potret Pemerataan Pendidikan di Desa Oleh sebab itu penelitian ini menarasikan kajian tersebut demi upaya melancarkan pemerataan pendidikan di desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,<sup>8</sup> dengan pendekatan studi literatur dari berbagai kajian pustaka dari artikel hasil penelitian yang relevan dengan tema. Potret Pemerataan Pendidikan di Desa analisis terhadap literature yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang layanan di desa bagaimana cara pemerataan pendidikan di desa tersebut, dan menggunakan metode kualitatif yang mencari dari sumber-sumber dari buku dan jurnal. Dalam penelitian ini terkait tugas seorang guru atau pemimpin yang mendeskripsikan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya penelitian ini dimulai untuk mengetahui bagaimana perkembangan dalam proses pembelajaran di desa yang sedang berjalan, dan meneliti tentang pendidikan di desa tersebut. Dan akhirnya penelitian ini juga membahas tentang perkembangan pendidikan yang terjadi di desa dan juga kesenjangan yang terjadi dan akhirnya itu menjadi sebuah evaluasi untuk diperbaiki. Sehingga penelitian ini bisa dikembangkan di tengah masyarakat bahkan bisa mengubah pola pikir yang menjadi hambatan dalam pemerataan pendidikan di desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Potret Pemerataan***

Program desentralisasi mencakup pemerataan pendidikan. Ini adalah bagian dari transformasi pemerintahan dari sentralisasi sampai ke desentralisasi. Pemerintah Pusat membuat suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, keputusan ini yang dianggap tidak sesuai dengan pada perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan pemerataan pendidikan di desa dan di tengah masyarakat indonesia. Dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia dalam menghadapi berbagai hambatan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2004, masalah ini muncul di daerah-daerah pedesaan yang sangat jauh dari perkotaan, di mana layanan pendidikan pada saat masih belum terjangkau secara merata. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tenaga pendidik yang terbatas, infrastruktur wilayah yang kurang, sarana transportasi yang kurang, dan aksesibilitas layanan pendidikan yang tidak merata di setiap desa. Selain itu juga ada masalah keuangan yang menghalangi pemerataan pendidikan karena akses pendidikan yang terbatas. Semakin tinggi tingkat pada pendidikan, maka semakin besar biaya yang harus ditanggung oleh siswa. Selain itu, siswa dapat memperoleh akses ke

---

<sup>7</sup> Lola Inganta Saragih et al., "Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan," *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2S (2022): 674–680.

<sup>8</sup> Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 37.

berbagai aspek proses belajar jika tingkat pendidikannya lebih ditingkatkan lagi.<sup>9</sup> Maka itu program desentralisasi pendidikan bertujuan untuk mencapai pemerataan pendidikan di Indonesia, namun menghadapi hambatan seperti terbatasnya tenaga pendidik, infrastruktur, transportasi, aksesibilitas, dan masalah keuangan, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari perkotaan.

Teori ini sangat menentukan bagaimana persediaan ruang kelas agar setiap siswa bisa mengambil bagian dalam proses belajar, karena yang kita ketahui bahwa permasalahan hanya terjadi di kurangnya ruang kelas untuk siswa dapat belajar sehingga itu yang menjadi persoalan bagi setiap siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan pengetahuan, khususnya yang dimiliki pemerintah, seharusnya digunakan untuk membantu anak-anak terlantar keluar dari kebodohan, keterbelakangan, dan keterasingan sosial. Bahkan menjaga anak supaya tidak mengalami kekerasan.<sup>10</sup> Ini dapat dilakukan dengan memperluas dan meratakan akses pendidikan bagi mereka. Keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak terlantar dapat menyebabkan hilangnya generasi di masa depan dan terus menciptakan kelas marginal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak istimewa diturunkan kepada generasi berikutnya agar mata rantai kemiskinan tidak berlanjut. Akses pendidikan menjadi sangat penting untuk memungkinkan anak-anak terlantar untuk memutus mata rantai reproduksi kelas yang sama, memungkinkan mereka untuk meningkatkan kelas mereka terhadap generasi berikutnya dan terhadap diri mereka sendiri. Studi yang dilakukan oleh Anwar Sitepu dan Irmayani di Jakarta Barat mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Studi tentang Isu-Isu Penelantaran, Pengucilan, dan Kerentanan Anak mereka menemukan bahwa orang tua yang tidak berdaya secara sosial dan ekonomi adalah salah satu penyebab penelantaran anak di Jakarta Barat. Hal ini juga berarti telah terjadi reproduksi kelas yang tidak berdaya secara maksimal.

Gagasan ini juga sejalan dengan teori Bourdieu 2009 yang sangat relevan dengan teori praktik sosialnya, yang dimana didasari oleh konsep habitus, modal, dan ranah. Anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan akses pendidikan dalam waktu lama akan menginternalisasi habitus tertentu yang mempengaruhi praktik kehidupan sosial mereka. Habitus yang terinternalisasi ini akan terlihat dalam berbagai interaksi sosial, seperti tingkah laku, cara berbicara, cara berpakaian, bahkan dalam cara berpikir mereka. Mereka cenderung berpikir pragmatis, seperti bagaimana cara bertahan hidup sehari-hari. Dalam wawancara, beberapa informan menyatakan bahwa mereka sulit membayangkan mendapatkan pendidikan yang baik karena kondisi ekonomi mereka. Ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka sangat terbatas karena habitus kelas marginal yang terinternalisasi, serta kurangnya modal ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mengubah situasi sosial dan gaya belajar mereka, diperlukan intervensi yang mendalam.<sup>11</sup> dengan demikian gagasan ini sejalan dengan teori praktik sosial Bourdieu, yang

---

<sup>9</sup> Thomas Joni Verawanto Aristo, "Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Sintang," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2019): 25–34.

<sup>10</sup> Andreas Fernando, Yonatan Alex Arifianto, and Sumiyati Sumiyati, "Peran Pendidikan Kristen Dalam Memerangi Kekerasan Pada Anak (Violance Against Child)," *Jurnal Teologi Praktika* 2, no. 2 (2021): 132–142.

<sup>11</sup> I Nyoman Wijana and Muhamad Suhardi, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)* 1, no. 1 (2018): 11–23.

menunjukkan bahwa anak-anak terlantar yang tidak mendapat akses pendidikan menginternalisasi habitus marginal, yang membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dan memerlukan intervensi mendalam untuk mengubah situasi sosial dan gaya belajar mereka.

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan moral, etika, dan tanggung jawab terhadap lingkungan untuk melaksanakan kepemimpinannya. Pembangunan juga dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin dalam hal berkomunikasi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang baik secara otomatis akan menumbuhkan rasa empati dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan aspirasi bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan. Seorang pemimpin harus mengutamakan etika. Termasuk dalam kategori ini adalah tegas, peduli, amanah, jujur, bijaksana, bermoral, cerdas, dan integritas. indikator moral yang diharapkan oleh masyarakat. Kepemimpinan nasional yang kompeten yang dievaluasi akan mampu menangani masalah di masa depan. Jika seorang pemimpin hanya mengandalkan jumlah masa, itu akan menyebabkan krisis sosial dan menghalangi siswa yang ingin belajar lebih banyak.<sup>12</sup> Oleh sebab itu seorang pemimpin harus memiliki kemampuan moral, etika, dan komunikasi yang baik untuk membangun rasa empati, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjalankan kepemimpinan yang kompeten dan bertanggung jawab guna menghindari krisis sosial dan mendukung pendidikan yang lebih baik.

Hampir semua orang menyadari masalah ketidakmerataan dalam pelayanan terhadap tenaga pengajar maupun guru di daerah. Perspektif guru berbeda di setiap pulau. Keadaan dan fasilitas di setiap pulau pun sangat berbeda, termasuk Pulau Jawa, berbeda dengan pulau yang di luar Jawa. Ujian Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 menunjukkan faktanya. Pemerintah ingin mengetahui kemampuan guru saat ini berdasarkan ujian keterampilan ini agar pemerintah dapat memberikan bantuan tambahan. Hasil dari UKG tahun 2014 menunjukkan bahwa hasil ujian yang paling tertinggi yaitu diraih oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil yang terendah yaitu Provinsi Maluku Utara, dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur.<sup>13</sup> Permasalahan pada kemiskinan merupakan salah satu rintangan yang utama dalam pembangunan wilayah di Jawa Timur. Dimana yang masih tingginya pada angka kemiskinan di wilayah Jawa Timur menunjukkan bahwa kemiskinan haruslah menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Jawa Timur kemiskinan akan menurun hingga 1,03% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa adanya sebuah peningkatan pada kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Timur.<sup>14</sup> Maka itu ketidakmerataan pelayanan dan fasilitas pendidikan antar wilayah, seperti yang terlihat dalam hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) 2015, menunjukkan perbedaan signifikan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya, sementara kemiskinan di Jawa Timur menjadi rintangan utama dalam pembangunan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Muhammad Husein Maruapey et al., "Model Kepemimpinan Nasional Dan Pemerataan Pembangunan Di Indonesia Model Of National Leadership And Equity Development In Indonesia," *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 5, no. 1 (2023): 20–33. Himawan Estu Bagijo, "Potret Pemenuhan Hak-Hak Sosial Rakyat Miskin Di Jawa Timur," *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 162.

<sup>13</sup> Guru di Daerah, "Pandangan Untuk Potret Ketidakmerataan Pelayanan Terhadap" (n.d.).

<sup>14</sup> Hamid Darmadi, "Tugas, Peran, Kompetensi, Dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional," *Jurnal Edukasi* 13, no. 2 (2015): 161–174.

## ***Peran Penting Pendidikan di Desa***

Pendidikan itu dimana menciptakan lingkungan yang baik di mana siswa dapat belajar secara aktif dan merencanakan proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengembangkan kecerdasan, moralitas, spiritualitas, kepribadian, keterampilan, dan keluhuran budi yang dapat mereka gunakan untuk diri mereka sendiri pada masyarakat di sekitar mereka. Pendidikan di desa tidak dapat mengikuti perkembangan kota karena sistem pendidikan desa yang sangat lemah. Banyak sekolah di desa yang tidak bisa melakukan pengembangan kurikulum; sebaliknya, kami beradaptasi terlebih dahulu dengan kebutuhan masyarakat. Terkadang, pengembangan kurikulum di sekolah perkotaan lebih mirip dengan desain kurikulum pada umumnya. Setelah itu, dia dimasukkan ke sekolah terakhir, dan karena anak-anak desa biasanya tidak mau bekerja di desanya sendiri, sehingga dia lebih memilih mencari pekerjaan di kota. Di Indonesia, mahalnya biaya pendidikan bukanlah masalah baru. Meskipun pemerintah memberikan pengecualian dengan menyediakan berbagai beasiswa untuk siswa yang tidak mampu untuk membayar keuangan sekolah. Kemudian masalah infrastruktur pendidikan mulai muncul: banyak sekolah memiliki fasilitas yang buruk serta tidak layak untuk mendukung pendidikan. Banyak gedung-gedung sekolah yang sudah ambruk, rusak, serta tidak layak digunakan lagi, yang terutama di wilayah pedesaan. Dimana sekolah harus memiliki sebuah fasilitas-fasilitas dan gedung yang baik agar setiap siswa merasa lebih nyaman pada saat belajar. Sekolah tidak hanya memiliki infrastruktur yang buruk, tetapi juga memiliki buku pelajaran yang rusak. Sebagian besar konten buku pelajaran dapat ditemukan di dalamnya. Hal ini dapat merusak moral dan nilai pada siswa yang merupakan suatu bagian dari bangsa ini. Penerbit buku pelajaran seharusnya menghormati nilai-nilai moral dalam karya mereka. Salah satu masalah dalam pendidikan yang terus-menerus diperdebatkan yaitu masalah dana bantuan operasional sekolah. Meskipun dana ini telah dialokasikan kepada siswa yang kurang mampu, namun dana ini masih belum sampai ke orang yang berhak mendapatkannya. Banyak kasus di mana dana diambil oleh pihak sekolah yang dimana dana ini tidak diberikan kepada siswanya, atau diberikan kepada siswa yang lebih mampu dan kemudian siswa yang tidak mampu sangat kesusahan.<sup>15</sup> Dengan demikian pendidikan di desa menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakmampuan mengikuti perkembangan kurikulum, infrastruktur sekolah yang buruk, biaya pendidikan yang tinggi, dan distribusi dana bantuan yang tidak tepat sasaran, yang menghambat kesempatan belajar dan merusak nilai moral siswa.

Kehidupan masyarakat desa berkembang seiring dengan modernisasi; dengan kata lain, dimana desa yang semakin mirip dengan kota besar dan kecil yang mencoba sampai ke sana. Masyarakat desa semakin tertarik pada kehidupan kota karena mereka menggunakan perangkat elektronik canggih untuk berpikir dan bertindak seperti orang kota. Memang tidak aneh bahwa orang-orang di kota cenderung menggunakan pepatah "kalau sesuatu itu mudah, mengapa sulit?" untuk membangun kebiasaan baru. Membangun sekelompok orang tidak mudah dan memakan waktu. Investor yang masuk ke sektor tersebut. Desa harus memiliki sebuah kebiasaan seperti di

---

<sup>15</sup> Azwar Yusran Anas, Agus Wahyudi Riana, and Nurliana Cipta Apsari, "Desa Dan Kota Dalam Potret Pendidikan," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2015).

kota.<sup>16</sup> Maka itu masyarakat desa semakin terpengaruh oleh modernisasi dan kehidupan kota, menggunakan perangkat elektronik canggih dan mengadopsi kebiasaan kota, meskipun membangun kebiasaan baru dan membentuk komunitas yang kuat di desa memerlukan waktu dan upaya.

Pendidikan adalah upaya sadar untuk mempromosikan kegiatan agar meningkatkan ketajaman bisnis setiap orang. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mendorong perbaikan pada sumber daya manusia. Seseorang diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aktivitas yang memungkinkan mereka untuk berpikir secara ekonomi, yang berarti mereka dapat memaksimalkan potensi yang tersedia. Menurut Drijarkara, bahwa pendidikan yaitu memanusiakan manusia. Pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga sebagai pendidikan informal, di lingkungan sekolah sebagai pendidikan formal dan lingkungan masyarakat sebagai pendidikan informal yang berlangsung sampai seumur hidup. Umumnya masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah mereka juga mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat masih belum memahaminya pentingnya pendidikan. Masyarakat masih menganggap itu pendidikan tidak menjamin hidup sejahtera, jauh dari kemiskinan. Mereka beranggapan bahwa sekolah hanya membuang-buang waktu dan uang. Namun Pendidikan Dasar saja tidak cukup untuk mendukung kelanjutan pembangunan Banyak yang tidak berhasil menyelesaikan sekolah dasar dengan kelulusan. Banyaknya masyarakat yang belum memperoleh sembilan pendidikan dasar Indonesia pada tahun 1990an sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Salah satunya terjadi di Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat di Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Pada tahun 2009, terdapat 654 anak 6-18 tahun yang mengikuti wajib sekolah. Namun terdapat 70 orang anak yang tidak dapat bersekolah, yang artinya 10,8% anak tidak bisa bersekolah memperoleh pendidikan dasar.<sup>17</sup> Tentunya pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, seperti di Desa Srigading, masih menganggap pendidikan tidak menjamin kesejahteraan, dengan banyak anak yang tidak dapat mengakses pendidikan dasar.

Kemauan untuk berpartisipasi adalah kunci utama untuk menambah partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Kemampuan dan kesempatan yang cukup tidak menjamin bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat dan berkembang. Jika masyarakat memiliki kemampuan yang diberikan untuk berpartisipasi, namun jika mereka tidak memiliki keinginan di dalamnya maka itu tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, untuk memiliki kemampuan ini harus ada seseorang agar mendorong untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Salah satu cara untuk melihat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan dan pengembangan desa wisata adalah dengan melihat seberapa sering masyarakat hadir dalam pertemuan yang dilakukan oleh pengelola desa wisata. Terkadang,

---

<sup>16</sup> Askar Nur, "Paradigma Masyarakat Dan Keredupan Masa Depan Pendidikan Di Desa (Potret Pendidikan Masyarakat Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan)" (2020).

<sup>17</sup> Siti Juariyah and others, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur," *Jurnal ekonomi dan pendidikan* 7, no. 1 (2010).

kehadiran masyarakat dalam pertemuan tersebut tidak sebanding dengan waktu luang warga yang diundang. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan fisik dan nonfisik, terutama ekonomi, adalah cara untuk mengukur partisipasi mereka dalam kegiatan.

Setiap wisata pendidikan harus memiliki dua komponen ini. Konsep ini memberi wisatawan kesempatan untuk menikmati kesenangan di tempat wisata dan juga memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Pengembangan kapasitas lembaga masyarakat sebagai lembaga pengelola desa wisata (kompepar) : Untuk menjaga penerimaan dan komitmen masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan, diperlukan kelembagaan yang kuat untuk mengontrol proses pengembangan desa wisata di wilayah tersebut. Dengan kata lain, kelembagaan yang mendukung pengembangan dan pengelolaan desa wisata menjadi faktor pendukung keberhasilan pengembangan desa wisata tersebut. dan Pranarka yang menjelaskan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif.<sup>18</sup> Maka itu adanya wisata pendidikan yang sukses memerlukan keseimbangan antara kesenangan dan pengetahuan, serta pengembangan kapasitas lembaga masyarakat yang kuat untuk mengelola desa wisata, di mana pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif.

Dalam program pembinaan untuk masyarakat di sekitar area pertambangan, sektor pendidikan sangat penting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai inisiatif seperti penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian beasiswa untuk pendidikan tinggi. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar tambang, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara finansial. Selain pendidikan, program ini juga mencakup sektor-sektor lain seperti kesehatan, sosial budaya, lingkungan, infrastruktur, kemandirian ekonomi, dan pengembangan komunitas. Meskipun demikian, dalam studi ini, fokus utama hanya pada sektor pendidikan dan tidak mencakup sektor-sektor lainnya.<sup>19</sup>

### ***Pendidikan Kristen***

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pada Bab I pasal 1 ayat 1 mengatakan Pendidikan agama termasuk Pendidikan Agama Kristen adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, dan pada Bab II pasal 3 ayat 1 dan 2: (1) Setiap satuan Pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan Agama termasuk Pendidikan Agama Kristen. (2) Pengelolaan Pendidikan Agama termasuk Pendidikan Agama Kristen dilaksanakan oleh Menteri Agama.<sup>20</sup> Menurut E. G. Homrighausen. PAK adalah pelajar muda dan tua supaya memahami dan mengakui persekutuan yang hidup dengan Dia dan memuliakan nama-Nya di manapun dan

---

<sup>18</sup> Encang Saepudin, Agung Budiono, and Mas Halimah, "Pengembangan Desa Wisata Pendidikan Di Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat," *Sosiohumaniora* 21, no. 1 (2019): 1–10.

<sup>19</sup> Hamdi Gugule and Romi Mesra, "Studi Pemetaan Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Sektor Pendidikan Di Desa Lingkar Tambang Kabupaten Bolaang Mongondow," *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 3, no. 1 (2022): 51–58.

<sup>20</sup> Hasudungan Simatupang dkk, *Pengantar Pendidikan Agama Kristen*, (Yogyakarta: Andi, 2020), 9.

kapanpun.<sup>21</sup> Menurut Warner C. Graendrof. PAK (Pendidikan Agama Kristen) merupakan pembelajaran yang berlandaskan pada Alkitab, berfokus pada Kristus, dan bergantung pada bimbingan Roh Kudus. Proses ini bertujuan untuk membimbing setiap individu dalam setiap tahap perkembangan mereka.<sup>22</sup> Menurut Martin Lutter, bahwa PAK (Pendidikan Agama Kristen) adalah pendidikan yang bertujuan untuk membimbing jemaat agar memahami pentingnya ketertiban dan keteraturan, menyadari dosa-dosa mereka, serta menemukan sukacita dalam Firman Yesus Kristus yang membebaskan.<sup>23</sup> Menurut John Calvin. PAK adalah pendidikan PAK tujuannya untuk mendidik semua putra putri gereja supaya mereka cerdas dalam menelaah Alkitab dan dibimbing oleh Roh Kudus. Hal ini dilakukan supaya para putra putri gereja bisa mengambil bagian dalam kebaktian, serta memahami keesaan gereja, para putra putri gereja tersebut diperlengkapi dengan cara-cara mengejawantahkan pengabdian diri kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam pekerjaan setiap hari mereka, hidup bertanggung jawab di bawah kedaulatan Allah demi kemuliaan-Nyasebagai lambang ucapan syukur.<sup>24</sup> Jadi, Pendidikan Agama Kristen (PAK) di sekolah pada hakekatnya diartikan sebagai proses untuuk perubahan sikap dan tingkah laku serta etika Kristen pribadi maupun kelompok untuk mencapai kearah yang lebih baik.<sup>25</sup> Dan belajar untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus sebagai contoh Guru Agung yang selalu peduli kepada manusia.<sup>26</sup> Dengan demikain pendidikan Agama Kristen (PAK) di sekolah bertujuan untuk membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama, dengan menekankan pemahaman Alkitab, bimbingan Roh Kudus, dan meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari.

### ***Strategi Pembelajaran Potret Pemerataan Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan***

Akses (*accessibility*) didefinisikan secara berbeda untuk berbagai tingkat pendidikan. Pemerintah harus berkewajiban untuk bisa menjamin akses ke pendidikan kepada semua masyarakat terkhusus bagi setiap mereka yang membutuhkan pendidikan tetapi tidak untuk pendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, wajib belajar harus bebas dari biaya pada golongan pendidikan dasar, tetapi untuk pendidikan menengah dan tinggi, mungkin memerlukan pembayaran uang sekolah dan biaya lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai Pendidikan yang masih “terjangkau”. Tomasevski mengingatkan, terjadinya tren peningkatan mengenai pungutan biaya Pendidikan pada kelompok Pendidikan menengah yang semakin tinggi, hal ini sangat bertolak belakang dengan spirit hukum hak asasi manusia. Maka dari itu, harus berhati-hati dalam melakukan pungutan biaya Pendidikan. Isu global sudah menyoroti mengenai

---

<sup>21</sup> Homrighausen dan Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen* (( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), n.d.), 56.

<sup>22</sup> Werner C. Graendorf, *Introduction to Biblical Christian Education* (Chicago: Moody press, 1981), 16.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 342.

<sup>24</sup> Robert R. Boehike, *Sejarah Perkembangan Pendidikan Dan Praktek* ((Jakarta : BPK Gunung Media, 1994), 1994), 414.

<sup>25</sup> Risnayanti, “Peran Guru Pak Dalam Menanamkan Nilai Etika Kristen Bagi Peserta Didik Usia 7-12 Tahun,” *Repository :Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (Setia) Jakarta* 1, no. 2 (2019): 39.

<sup>26</sup> Ester Berlian Haan and Yonatan Alex Arifianto, “Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Tinjauan Alkitabiah Upaya Teladan Guru Masa Kini,” *Shalom: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 1 (2022): 15–26.

aksesibilitas dan hak asasi mausia dibidang pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting guna meningkatkan mutu dan kapasitas seluruh warga negara untuk merasakan pendidikan yang layak agar tujuan negara dapat tercapai. Termasuk juga setiap masyarakat yang sangat membutuhkan pendidikan yang layak bagi setiap mereka.<sup>27</sup>

Aksesibilitas pendidikan merupakan suatu keadaan di mana pada setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk memasuki suatu program pada pendidikan. Aksesibilitas ini dapat dicapai melalui dari sikap sosial yang non-diskriminatif, kebijakan pada politik dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung dan mencegah diskriminasi, sehingga lingkungan pendidikan yang sangat mudah diakses, alat bantu proses belajar dan pengajar yang sesuai pada bidangnya, biaya pendidikan yang mudah terjangkau, aksesibilitas pendidikan lainnya.<sup>28</sup> Dengan demikian pentingnya aksesibilitas pendidikan mencakup kesempatan yang setara bagi setiap anggota masyarakat untuk mengakses program pendidikan melalui kebijakan non-diskriminatif, peraturan yang mendukung, biaya yang terjangkau, serta fasilitas dan pengajar yang sesuai dengan bidangnya.

### ***Pengembangan Kurikulum Relevan***

Kurikulum harus dikembangkan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa implementasi pada kurikulum dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih relevan dengan tuntutan pada stake holder dan kebutuhan setiap siswa. Menurut Dzakir, bahwa pengembangan kurikulum adalah upaya mengarahkan kurikulum saat ini pada tujuan pendidikan yang akan diharapkan. Tujuan ini dilakukan karena pengaruh positif dari dalam maupun dari luar bidang pendidikan, dengan harapan agar siswa memiliki masa depan yang lebih baik.<sup>29</sup> Relevansi Internal atau Relevansi Eksternal merupakan bahwa tujuan dari isi serta proses belajar dalam kurikulum yang harus lebih relevan pada kebutuhan dan perkembangan setiap masyarakat. Siswa harus disiapkan untuk hidup dan bekerja di tengah masyarakat sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan sehingga dapat mempersiapkan anak-anak ke masa depan yang lebih baik lagi.<sup>30</sup> Kurikulum harus terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan stakeholders, agar dapat mempersiapkan siswa untuk hidup dan bekerja di masa depan yang lebih baik.

### ***Pemberdayaan Guru dan Tenaga Pendidik***

Pendekatan keseluruhan untuk manajemen pendidikan ini dikenal sebagai pemberdayaan guru. Pendekatan ini mencakup pada pemberdayaan sumber daya manusia, sistem dalam pembelajaran, institusi pada pendidikan, dan sarana atau prasarana sebagai sistem pendukung.

---

<sup>27</sup> Muhammad Saiful Anwar, "Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Perpsektif Pendidikan Multikultural," *Foundasia* 13, no. 1 (2022): 1–15.

<sup>28</sup> Novrian Satria Perdana, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 21, no. 3 (2015): 279–298.

<sup>29</sup> Mohammad Syarif, "Strategi Pengembangan Kurikulum Yang Relevan Dengan Pangsa Pasar Kerja," *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 7, no. 1 (2018): 124–137.

<sup>30</sup> Agustinus Tanggu Daga, "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 Hingga Kebijakan Merdeka Belajar)," *Jurnal Edukasi Sumba (JES)* 4, no. 2 (2020): 103–110.

Menurut Ustam dan Muniarti, pemberdayaan sebagai pendekatan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta memberikan suatu tanggung jawab dan wewenang kepada setiap karyawan dengan tujuan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Maka dari itu, untuk mengelola sumber daya manusia dalam mencapai tujuan setiap individu, organisasi, dan masyarakat disebut pemberdayaan. Kepala sekolah, sebagai pemimpin lembaga pendidikan, memainkan peran penting dalam proses pemberdayaan guru. Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai proses di mana seseorang diberi atau diberikan bagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan untuk membantu menjadi lebih berdaya guna lagi. Oleh karena itu, kepala sekolah dapat memberikan atau mengalihkan salah satu tugas kepada guru yang mampu untuk membantu mereka berkembang menjadi lebih profesional. Proses pada pemberdayaan menekankan suatu proses stimulasi dengan memberikan sebuah dorongan atau motivasi agar individu memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk membuat pilihan hidup mereka sendiri. Proses ini dilakukan melalui komunikasi yang positif. Dalam aktualisasi diri, proses pemberdayaan diri mengacu pada upaya seseorang untuk menjadi lebih baik lagi dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Untuk memberi guru motivasi agar memberdayakan diri, kepala sekolah harus menjalin komunikasi yang positif dengan gurunya.<sup>31</sup> Secara sistematis dan berkelanjutan, peningkatan kompetensi guru dapat meningkatkan profesionalitas guru. Guru yang berkualitas tinggi dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam proses pembelajaran dengan melanjutkan pendidikan, dan mengembangkan karakter, dan mengikuti seminar dan lokakarya.<sup>32</sup> Oleh karena itu, pemberdayaan pada guru sangat penting pada pendidikan. Sehingga kompetensi guru dapat terus di tingkatkan dalam sekolah.

## KESIMPULAN

Pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah-daerah pedesaan yang terisolasi dari akses pendidikan yang memadai. Meskipun telah ada upaya pemerintah melalui kebijakan desentralisasi dan penyediaan dana bantuan pendidikan, masalah terkait infrastruktur yang buruk, kurangnya tenaga pendidik, dan kesulitan finansial yang dihadapi oleh keluarga miskin masih menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan pendidikan yang lebih baik, dibutuhkan kebijakan yang lebih efektif, seperti peningkatan aksesibilitas pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan pemberdayaan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat desa, karena dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan di desa harus lebih diperhatikan dengan menyediakan fasilitas yang memadai, menyusun kurikulum yang sesuai dengan kondisi lokal, serta memastikan adanya dukungan finansial yang tepat agar setiap anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang layak.

---

<sup>31</sup> Felia Limbong and Yonatan Alex Arifianto, "Strategi Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAKEM," *TELEIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 1 (2022): 41–51.

<sup>32</sup> Hotmaulina Sihotang and others, "Kepemimpinan Transformasional Dan Pemberdayaan Guru Dalam Tranformasi Pendidikan 4.0," *Jurnal Dinamika Pendidikan* 13, no. 2 (2020): 204–215.

Dengan cara ini, pendidikan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan pemerataan sosial dan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Azwar Yusran, Agus Wahyudi Riana, and Nurliana Cipta Apsari. "Desa Dan Kota Dalam Potret Pendidikan." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2015).
- Anwar, Muhammad Saiful. "Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Perpektif Pendidikan Multikultural." *Foundasia* 13, no. 1 (2022): 1–15.
- Aristo, Thomas Joni Verawanto. "Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Sintang." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2019): 25–34.
- Bagijo, Himawan Estu. "Potret Pemenuhan Hak-Hak Sosial Rakyat Miskin Di Jawa Timur." *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 162.
- di Daerah, Guru. "Pandangan Untuk Potret Ketidakmerataan Pelayanan Terhadap" (n.d.).
- Daga, Agustinus Tanggu. "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 Hingga Kebijakan Merdeka Belajar)." *Jurnal Edukasi Sumba (JES)* 4, no. 2 (2020): 103–110.
- Darmadi, Hamid. "Tugas, Peran, Kompetensi, Dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional." *Jurnal Edukasi* 13, no. 2 (2015): 161–174.
- Fernando, Andreas, Yonatan Alex Arifianto, and Sumiyati Sumiyati. "Peran Pendidikan Kristen Dalam Memerangi Kekerasan Pada Anak (Violence Against Child)." *Jurnal Teologi Praktika* 2, no. 2 (2021): 132–142.
- Graendorf, Werner C. *Introduction to Biblical Christian Education*. Chicago: Moody press, 1981.
- Gugule, Hamdi, and Romi Mesra. "Studi Pemetaan Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Sektor Pendidikan Di Desa Lingkar Tambang Kabupaten Bolaang Mongondow." *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 3, no. 1 (2022): 51–58.
- Haan, Ester Berlian, and Yonatan Alex Arifianto. "Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Tinjauan Alkitabiah Upaya Teladan Guru Masa Kini." *Shalom: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 1 (2022): 15–26.
- Hadi, Rusman. "Respon Lembaga Pendidikan Islam Terhadap Isu Kristenisasi Pasca Gempa Di Dusun Lololan Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara" 7, no. 1 (2022): 256–266.
- Homrighausen dan Enklaar. *Pendidikan Agama Kristen*. ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), n.d.
- Juariyah, Siti, and others. "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur." *Jurnal ekonomi dan pendidikan* 7, no. 1 (2010).
- Limbong, Felia, and Yonatan Alex Arifianto. "Strategi Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Menerapkan Model Pembelajaran PAKEM." *TELEIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 1 (2022): 41–51.
- Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, and Wiryanto. "Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru

- Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan.” *Jurnal Cakrawala Pendas* 8, no. 3 (2022): 932–940.
- Maruapey, Muhammad Husein, Agus Suarman Sudarsa, Windi Wijayanti, Wahyudin Wahyudin, and Muhammad Jejen Jakaria. “Model Kepemimpinan Nasional Dan Pemerataan Pembangunan Di Indonesia Model Of National Leadership And Equity Development In Indonesia.” *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 5, no. 1 (2023): 20–33.
- Nur, Askar. “Paradigma Masyarakat Dan Keredupan Masa Depan Pendidikan Di Desa (Potret Pendidikan Masyarakat Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan)” (2020).
- Patandung, Yosef, and Selvi Panggua. “Analisis Masalah-Masalah Pendidikan Dan Tantangan Pendidikan Nasional.” *Jurnal Sinestesia* 12, no. 2 (2022): 794–805.
- Perdana, Novrian Satria. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 21, no. 3 (2015): 279–298.
- Purba, Asmat, Martin L Manao, and Alon Mandimpu Nainggolan. “Potret Pendidikan Di Indonesia: Pandangan Dan Peran Pendidik Kristen.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 178–189.
- Risnayanti. “Peran Guru Pak Dalam Menanamkan Nilai Etika Kristen Bagi Peserta Didik Usia 7-12 Tahun.” *Repository :Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (Setia) Jakarta* 1, no. 2 (2019): 39.
- Robert R. Boehike. *Sejarah Perkembangan Pendidikan Dan Praktek*. (Jakarta : BPK Gunung Media, 1994), 1994.
- Rosmana, Primanita Sholihah, Sofyan Iskandar, Nur Fadilah, Nabilah Azhar, Devi Oktavini, and Angelina Cristine Munte. “Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan Di Daerah 3T.” *Attadib: Journal of Elementary Education* 6, no. 2 (2023): 405–418.
- Saepudin, Encang, Agung Budiono, and Mas Halimah. “Pengembangan Desa Wisata Pendidikan Di Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat.” *Sosiohumaniora* 21, no. 1 (2019): 1–10.
- Saragih, Lola Inganta, Padhilah Dikri, Kuart Sidik Wahyono, and Suparna Wijaya. “Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan.” *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2S (2022): 674–680.
- Sihotang, Hotmaulina, and others. “Kepemimpinan Transformasional Dan Pemberdayaan Guru Dalam Tranformasi Pendidikan 4.0.” *Jurnal Dinamika Pendidikan* 13, no. 2 (2020): 204–215.
- Syarif, Mohammad. “Strategi Pengembangan Kurikulum Yang Relevan Dengan Pangsa Pasar Kerja.” *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 7, no. 1 (2018): 124–137.
- Umrati, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Vito, Benediktus, and Hetty Krisnani. “Kesenjangan Pendidikan Desa Dan Kota.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2015).

Wijana, I Nyoman, and Muhamad Suhardi. “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)* 1, no. 1 (2018): 11–23.